

MENGUNGKAP PERMASALAHAN BHMN-ISASI PTN (Pesan Kritis untuk BHMNisasi di Unair)

Oleh: Novri Susan, S.Sos

Pengajar di Jurusan Ilmu Sosiologi Unair Surabaya

Peneliti di PsaTS (Pusat Kajian Transformasi Sosial) Unair

Krisis ekonomi telah membangkrutkan Indonesia. Sistem ekonomi lemah dan birokrasi *mlempem* kerja tetapi rajin korupsi samasekali tidak mampu menjawab krisis ekonomi yang dimulai pada akhir masa pemerintahan Soeharto, awal tahun 1998. Kebangkrutan Negara menyebabkan subsidi terhadap pendidikan mulai macet. Alternatif jalan keluar yang paling aman bagi Negara menghadapi situasi krisis perekonomian dalam dunia pendidikan adalah melakukan pengurangan subsidi. Pengurangan atau penghapusan subsidi ini kemudian dirasionalisasikan melalui penetapan status PTN menjadi otonom dengan status Badan Hukum.

PP (Peraturan Pemerintah) tentang otonomi kampus yang dikeluarkan Negara membawa status baru bagi PTN (Perguruan Tinggi Negeri), yaitu BHMN (Badan Hukum Milik Negara). BHMN diterapkan pertama kali untuk PTN yang sudah dianggap kuat, yaitu UI, IPB, ITB, dan UGM. Setelah proyek BHMNisasi (perubahan status menjadi BHMN) di empat universitas tersebut terlaksana maka dilanjutkan ke universitas negeri lainnya, termasuk Unair Surabaya. BHMN menjadi status baru bagi PTN. Adanya BHMN membawa perubahan secara mendasar terhadap seluruh visi misi dan sistem pendidikan di PTN. Dalam perspektif mahasiswa BHMN menyodorkan perubahan yang buruk daripada yang baik karena eksploitasi terhadap mahasiswa dalam bentuk mahal biaya pendidikan merupakan dampak tak terhindarkan. Mengapa hal ini bisa terjadi?

BHMNisasi sesungguhnya menggunakan logika dan metode kapitalistik untuk tumbuh berkembang. Kapitalisme merupakan *modes of production* (cara

produksi) yang menggunakan cara-cara eksploitatif dan berorientasi pada dua hal, yaitu penumpukan modal (kekayaan) dan perluasan pasar. Pada situasi ini PT BHMN (Perguruan Tinggi dalam status BHMN) mempunyai dua dimensi kondisi; **pertama** sebagai agen dan pelaksana *modes of production* kapitalisme, sekaligus; **kedua** sebagai korban dari kapitalisme itu sendiri.

Sebagai agen dan pelaksana kapitalisme PT BHMN menggunakan *modes of production* kapitalisme yang ditopang oleh rasionalitas instrumental sebagai alat mencapai tujuannya. Rasionalitas instrumental ini berarti bagaimana target dan kemajuan dicapai melalui prosedur-prosedur dan kontrol terhadap proses. Hal ini kemudian tampak jelas sekali dengan adanya MWA (Majelis Wali Amanat) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur kebijakan di PT BHMN. MWA adalah salah satu paradoks yang ditawarkan Pemerintah. Pada satu sisi menetapkan kampus telah otonom tetapi pada sisi lain menggunakan MWA untuk tetap mengukuhkan kontrolnya terhadap Perguruan Tinggi. Ini terbukti dengan 35% suara yang dimiliki wakil pemerintah yang duduk dalam MWA. Karena Pemerintah pada prinsipnya ingin tetap melakukan kontrol dan pengawasan terhadap prosedur-prosedur yang telah mereka buat dalam PT BHMN.

Rasionalitas instrumental ini semakin sempurna eksistensinya dengan usaha diciptakannya *Quality Assurance* /QA (Jaminan Mutu). QA adalah *blue print* masyarakat universitas yang harus dicapai melalui berbagai prosedur, dari masalah cara meminjam megaphone atau peralatan universitas sampai prosedur mengembalikan pinjaman tersebut. Akan tetapi di dalam QA tidak ditemukan prosedur membiayai pendidikan semurah mungkin atau bahkan gratis! Prosedur di dalam QA adalah prosedur mentaati kekuasaan sehingga proses BHMNisasi berjalan aman dan terkendali.

Selanjutnya *modes of production* dalam lembaga kapitalis akan berusaha mencari modal sebanyak yang ia mampu untuk kepentingan perluasan usaha dan jangkauan pasar. PT BHMN dalam mengumpulkan modal dilakukan melalui beberapa cara; menaikkan SPP mahasiswa setinggi-tingginya, menarik investor sebanyak mungkin, menjual hasil produksinya, dan terakhir mencari dana pinjaman dari lembaga-lembaga ekonomis lainnya. Langkah-langkah ini sangat serupa dengan langkah-langkah suatu perusahaan profit untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya atau mengembangkan usahanya.

Sudah tidak diragukan lagi kenaikan SPP mahasiswa yang terjadi di PT BHMN adalah bagian dari *modes of production* kapitalisme. Sumber dana yang terdekat adalah mahasiswa sehingga kenaikan SPP menjadi lahan paling mudah diakses karena tidak perlu melalui kesepakatan, tender, atau resiko-resiko lainnya. Mahasiswa dianggap sebagai konsumen yang memanfaatkan fasilitas pendidikan PT BHMN, dan bukan sebagai generasi bangsa yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini dan harus dibiayai pendidikannya. Akibatnya muncul jarak antara mahasiswa dan universitasnya sendiri, jarak antara konsumen dan produsen. Jarak yang akan memunculkan macetnya dinamika intelektual. Mahasiswa sibuk dengan biaya yang mahal dan pada gilirannya merubah dirinya menjadi sangat pragmatis, tidak berorientasi kelimuan melainkan cepat selesai dan kerja. Bekerja setelah lulus merupakan cita-cita yang normal akan tetapi ketika proses akademik direduksi menjadi alat untuk mencari kerja semata maka universitas tidak akan menghasilkan lulusan yang mempunyai kreativitas dan kemandirian. Mereka hanya akan mengharap mendapatkan pekerjaan dari dunia industrialisasi.

Selanjutnya, PT BHMN beramai-ramai mengundang investor masuk ke kampus untuk pengumpulan modal. Para investor menanamkan investasi ke PTN dan

akan menerima hasilnya dalam dua bentuk; keuntungan pengembangan modal (uang) dan menerima tenaga kerja siap pakai, murah, yang disediakan khusus untuk mereka. Dampak dari ini, kurikulum PT harus menyesuaikan terhadap kebutuhan perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya. Lebih luas lagi, fakultas atau jurusan yang tidak dibutuhkan oleh investor bisa digusur karena basis kurikulumnya sama sekali tidak dibutuhkan dalam industrialisasi seperti Filsafat atau sebagian Ilmu Budaya.

Jalan selanjutnya dari lembaga dengan sistem kapitalis adalah menjual hasil produksi. PT BHMN menganggap barang produksi yang bisa dijual adalah 'ruang kelas' dalam program-program pendidikan, seperti teknik, manajemen, hukum, ekonomi dan lainnya. Tak pelak lagi, kampus penuh sekali dengan program pendidikan dengan ruang kelas dan sumber daya dosen yang itu-itu saja. Tetapi yang paling mengesankan, program-program pendidikan tersebut adalah barang jualan yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang berkocek tebal. Program studi itu dijual dengan harga tinggi agar terkumpul modal yang mencukupi. Idealnya lembaga pendidikan menjual hasil penelitian-penelitiannya untuk mengumpulkan dana atau modal. Jika Unair belum bisa menjual hasil penelitiannya maka jalan yang ditempuh adalah memproduksi program-program studi dan menjualnya ke publik. Situasi ini telah terjadi di UI Jakarta maupun UGM Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah hasil penelitian di Unair telah mencapai kualitas yang bisa dijual?

Hasil produksi lain adalah mahasiswa. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, mahasiswa diberikan standar ganda oleh Pemerintah dan Rektoriat, sebagai konsumen dan sebagai hasil produksi. Sebagai hasil produksi lulusan mahasiswa dihargai oleh perusahaan-perusahaan sesuai dengan fakultasnya. Misalnya dokter 45 juta, Fisipol 15 Juta, dan Sastra 10 juta! Sistem ini disebut *block grand*,

dimana harga-harga lulusan akan menjadi referensi bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Langkah pamungkas PT BHMN untuk mengumpulkan modal adalah dengan mencari sumber dana dari pinjaman. Dana pinjaman ini sifatnya sama dengan meminjam ke Bank untuk usaha, harus mengembalikan jumlah yang dipinjam dan bunganya (*interest*). Bisa dibayangkan jika kampus sudah berhutang untuk membiayai pendidikan dan harus mengembalikan pinjaman bersama bunganya? Kosentrasi universitas akan terhisap pada bagaimana mengembalikan uang pinjaman. Jalan keluar universitas membayar hutang akan kembali ke cara-cara di atas. Mungkin juga gali lobang tutup lobang. Kecenderungan memilih jalan praktis ini juga merupakan ciri sistem kapitalisme.

BHMNisasi sama saja dengan merubah lembaga pendidikan menjadi lembaga kapitalis. Kejahatan-kejahatan yang dibawa oleh sistem itu secara garis besar adalah kecenderungan dibawahnya orang-orang yang ada di dalamnya ke jurang kehancuran. Sebagaimana pernyataan Anthony Giddens dalam *The Third Way* (1998), bahwa kapitalisme-modernisme seperti sebuah mobil truk dengan muatan terlampau besar dan sopirnya mengemudi dengan mata tertutup (tak peduli). BHMNisasi yang menggunakan kapitalisme sebagai *modes of production* dan rasionalitas instrumental sebagai alat *achievement*-nya kemungkinan besar akan bernasib seperti itu. Sebagaimana Pemerintahan Soeharto telah salah dalam memilih metodologi pembangunan nasional selama ini yang berakibat terhadap hancurnya berbagai sistem kehidupan sosial, ekonomi, politik dan termasuk kerusakan-kerusakan ekologis.

Dampak BHMNisasi terhadap berbagai dimensi kemanusiaan dan sistem pendidikan ternyata mempunyai dampak-dampak buruk yang harus diwaspadai. Sebuah sistem besar dan tampak megah, sebenarnya terdapat banyak penyimpangan

dan kekejian. Upaya pengawalan terhadap BHMNisasi di beberapa universitas sudah dilakukan oleh berbagai elemen gerakan mahasiswa dan civitas akademik. Dalam pandangan gerakan mahasiswa BHMN merupakan konsep kapitalis, eksploitatif, anti kerakyatan, dan menjadi budak industrialisme. Pandangan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pelaksana kebijakan, yaitu rektoriat dan pemerintah.

Pihak pelaksana BHMNisasi Perguruan Tinggi, dan Unair yang saat ini tengah memulai langkah, selain berusaha melaksanakan rumusan-rumusan yang telah diciptakan perlu melakukan telaah kritis terhadap sistem BHMN yang akan dilaksanakan. Usaha mengkritisi ini tentu saja tidak bertujuan menghalang-halangi proses BHMNisasi melainkan upaya mengidentifikasi masalah-masalah besar yang bisa muncul dan berdampak negatif bagi banyak pihak, baik mahasiswa, universitas, dan rakyat secara umum yang ingin mengakses pendidikan. Dari usaha kritisi ini suatu rancangan antisipati dapat dirumuskan secara bijak. Usaha ini adalah pengawalan terhadap suatu sistem yang sifatnya teknis pragmatis sebagaimana dikandung oleh sistem BHMN sehingga kita mampu menciptakan suatu sistem pendidikan yang baik. *Wallahu'alam!*